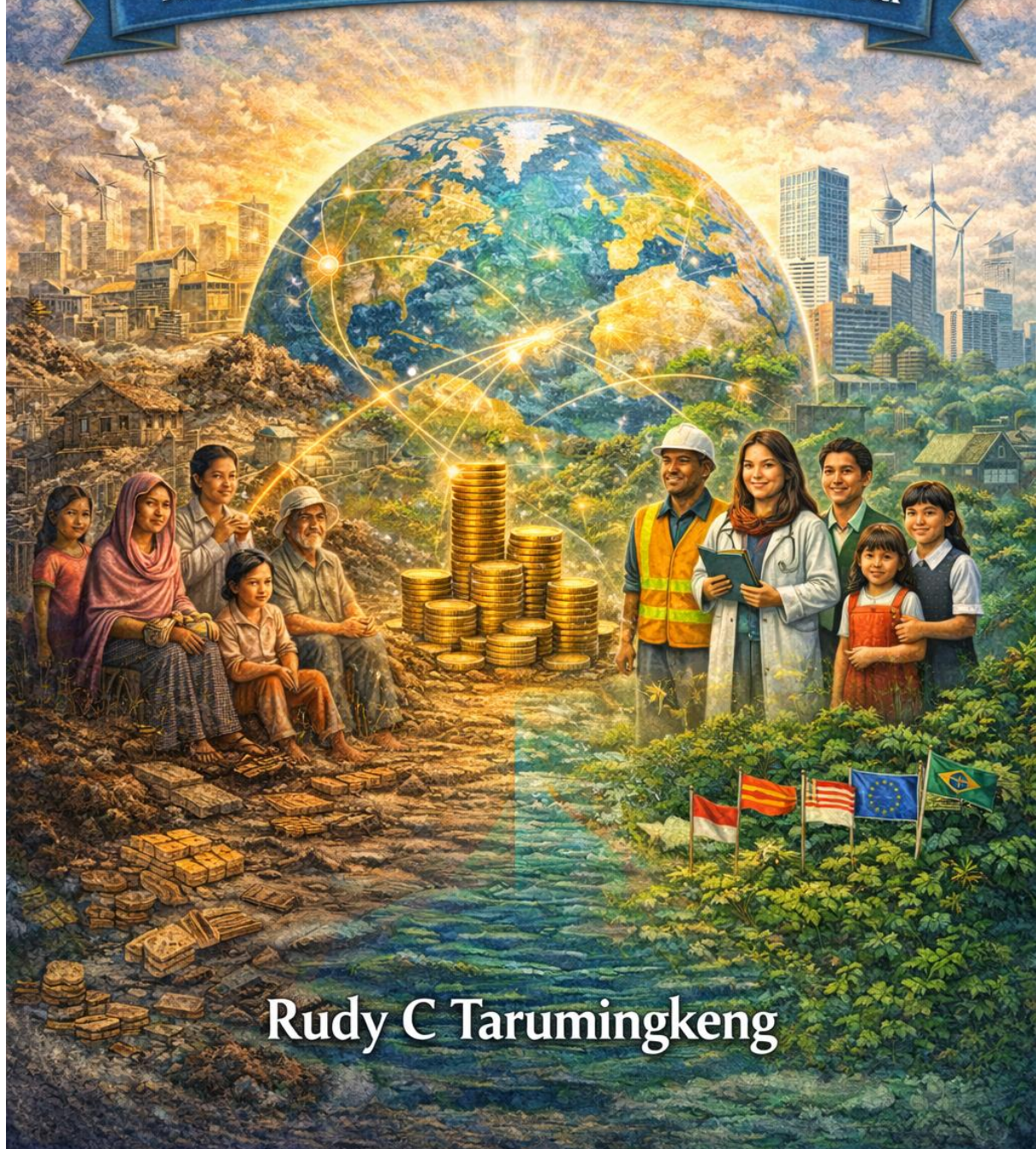


Kemakmuran Tanpa Eksklusi

Menjawab Krisis Ketimpangan Global



Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

13 April 2026

KEMAKMURAN TANPA EKSKLUSI: MENJAWAB KRISIS KETIMPANGAN GLOBAL

Abstrak

Makalah ini membahas krisis ketimpangan global dan menawarkan kerangka “kemakmuran tanpa eksklusi” sebagai arah normatif sekaligus kebijakan bagi dunia modern. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi global, keterbukaan perdagangan, inovasi teknologi, dan perluasan pasar memang telah menghasilkan kemajuan material yang besar, tetapi manfaatnya tidak terdistribusi secara merata. Dunia menjadi lebih kaya, namun kesenjangan antarwilayah tetap sangat lebar, ketimpangan di dalam banyak negara tetap tinggi, kemajuan pembangunan manusia melambat, pekerjaan layak belum tersedia bagi semua, dan perlindungan sosial masih belum menjangkau miliaran orang secara memadai. Karena itu, persoalan utama zaman ini bukan sekadar bagaimana menumbuhkan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan memperluas partisipasi, keamanan, mobilitas sosial, dan martabat manusia. ([World Bank](#))

Makalah ini menegaskan bahwa “kemakmuran tanpa eksklusi” menuntut perubahan paradigma: dari pertumbuhan rata-rata menuju distribusi kesempatan; dari efisiensi semata menuju pekerjaan bermutu dan perlindungan sosial; dari akses formal menuju kapabilitas nyata; serta dari globalisasi yang hanya menghubungkan pasar menuju globalisasi yang juga memperkuat keadilan sosial. Berdasarkan temuan World Bank, UNDP, ILO, OECD, WTO, ITU, WHO, dan World Inequality Database, tulisan ini

mengusulkan lima pilar jawaban: pertumbuhan yang kaya pekerjaan, pemerataan kesempatan dasar, jaring perlindungan sosial yang adaptif, inklusi digital dan finansial, serta tata kelola global yang lebih adil. Dengan demikian, kemakmuran yang sah bukanlah kemakmuran yang dinikmati segelintir pemenang, melainkan kemakmuran yang mengurangi eksklusi struktural dan memperbesar peluang hidup layak bagi sebanyak mungkin manusia. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Kata kunci: ketimpangan global, kemakmuran inklusif, kemiskinan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, pembangunan manusia, inklusi digital, kebijakan publik

Kemakmuran Tanpa Eksklusi: Menjawab Krisis Ketimpangan Global

1. Pendahuluan

Dunia kontemporer hidup di bawah paradoks besar. Di satu sisi, globalisasi, teknologi, dan integrasi pasar telah memperluas produksi, mempercepat aliran pengetahuan, dan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan ekstrem. WTO menegaskan bahwa selama kira-kira tiga dekade terakhir perdagangan telah berkontribusi pada konvergensi pendapatan yang besar antarnegeri dan memperbaiki kondisi hidup banyak orang. Namun WTO juga menegaskan bahwa manfaat itu tidak dibagikan secara setara kepada semua individu, wilayah, dan negara. Dengan kata lain, ekonomi global berhasil menciptakan kemajuan, tetapi belum berhasil memastikan keadilan dalam distribusi kemajuan tersebut. ([World Bank](#))

Di sisi lain, data mutakhir menunjukkan bahwa mesin kemajuan global sedang tersendat. World Bank melaporkan bahwa pengurangan kemiskinan global dan peningkatan *shared prosperity* nyaris berhenti,

sehingga dekade 2020–2030 dikhawatirkan menjadi “dekade yang hilang” bagi kemajuan sosial. Berdasarkan lintasan saat ini, 622 juta orang atau sekitar 7,3 persen populasi dunia masih diproyeksikan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, dan sekitar 3,4 miliar orang kemungkinan hidup dengan kurang dari US\$6,85 per hari. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi saat ini belum cukup kuat, belum cukup inklusif, atau belum cukup terlindung dari guncangan untuk mendorong lompatan kesejahteraan yang lebih luas. ([World Bank](#))

Kondisi ini diperberat oleh melambatnya pembangunan manusia. UNDP melaporkan bahwa kenaikan pembangunan manusia global yang diproyeksikan untuk 2024 merupakan yang paling lemah sejak 1990 di luar tahun-tahun krisis, dan ketimpangan antara negara ber-HDI rendah dan sangat tinggi meningkat untuk tahun keempat berturut-turut. Laporan ini penting karena mengingatkan bahwa kemajuan peradaban tidak dapat hanya diukur dari output ekonomi; ia juga harus dibaca dari pilihan hidup yang sungguh tersedia bagi manusia. ([Human Development Reports](#))

Dalam konteks itulah tema “kemakmuran tanpa eksklusi” menjadi sangat relevan. Istilah ini menunjuk pada tatanan ekonomi yang tidak hanya menambah kekayaan agregat, tetapi juga memperluas peluang partisipasi, menurunkan kerentanan, dan mengurangi pengucilan sosial-ekonomi berdasarkan kelas, wilayah, gender, usia, atau posisi digital. Makalah ini berangkat dari tesis bahwa krisis ketimpangan global bukanlah masalah pinggir dari pembangunan, melainkan inti dari persoalan pembangunan itu sendiri. Karena itu, jawaban atas krisis tersebut harus menghubungkan pertumbuhan, distribusi kesempatan, pekerjaan bermutu, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola global. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

2. Memaknai Kemakmuran Tanpa Eksklusi

Secara konseptual, kemakmuran tanpa eksklusi berarti lebih dari sekadar naiknya PDB per kapita. OECD melalui *How's Life? 2024* menegaskan bahwa menilai apakah hidup sungguh membaik memerlukan lebih dari 80 indikator yang mencakup kesejahteraan saat ini, ketimpangan, dan sumber daya bagi kesejahteraan masa depan. Pendekatan ini sangat penting karena menggeser fokus dari produksi menuju kualitas hidup. Masyarakat dapat tampak berhasil dalam statistik pertumbuhan, tetapi tetap gagal bila kesehatan mental memburuk, rasa aman menurun, relasi sosial melemah, atau peluang bagi kelompok bawah tetap tertutup. ([OECD](#))

World Bank juga menegaskan bahwa pertumbuhan rata-rata saja bukan penanda pembangunan yang memadai. Dalam catatan kebijakan G20 tahun 2024, Bank Dunia menekankan bahwa pertumbuhan inklusif memerlukan intervensi pada tiga tahap sekaligus: pra-pasar, di pasar, dan pasca-pasar. Pada tahap pra-pasar, negara harus memperkuat pendidikan, kesehatan, dan dukungan keluarga. Pada tahap di pasar, akses terhadap kerja, aset, kredit, dan perlindungan dari diskriminasi harus diperluas. Pada tahap pasca-pasar, pajak, transfer, dan subsidi harus digunakan untuk mengurangi ketimpangan hasil. Kerangka ini membantu kita memahami bahwa eksklusi tidak lahir pada satu titik saja, melainkan dibentuk sepanjang daur hidup warga. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Dari sudut pandang pembangunan manusia, kemakmuran tanpa eksklusi berarti memperbesar kebebasan nyata untuk hidup sehat, belajar, bekerja, bergerak, berpartisipasi, dan membangun masa depan. UNDP menegaskan bahwa masa depan pembangunan bergantung kurang pada apa yang bisa dilakukan AI dan lebih pada bagaimana manusia memilih untuk membentuk ekonomi dan masyarakat. Artinya, tantangan utama bukan sekadar mengejar kecanggihan teknologi atau output pasar, melainkan memastikan bahwa lebih banyak orang punya "kesempatan riil" untuk berkembang. ([Human Development Reports](#))

3. Diagnosis Krisis Ketimpangan Global

3.1 Dunia lebih kaya, tetapi jurangnya tetap lebar

World Inequality Database menunjukkan bahwa dunia memang semakin kaya, tetapi kekayaan itu tersebar sangat timpang. Pada 2023, rata-rata pendapatan nasional per kapita global sekitar €12.800 PPP per tahun, atau sekitar €1.065 per bulan. Namun angka ini menyembunyikan disparitas yang sangat besar: rata-rata di Sub-Sahara Afrika sekitar €240 per bulan, sedangkan di Amerika Utara dan Oseania lebih dari €3.500 per bulan. WID juga menegaskan bahwa ketimpangan di dalam negara tetap sangat besar di seluruh dunia. Data ini menolak ilusi bahwa pertumbuhan global dengan sendirinya akan menetes merata ke semua lapisan. ([WID - World Inequality Database](#))

World Bank menambahkan bahwa kemajuan dalam mengurangi *global prosperity gap* berhenti sejak pandemi. Laporan *Poverty, Prosperity, and Planet 2024* menyebut bahwa kemajuan pengurangan kemiskinan global melambat drastis; antara 2024 dan 2030 hanya sekitar 69 juta orang diproyeksikan keluar dari kemiskinan ekstrem, jauh lebih sedikit dibanding sekitar 150 juta orang pada periode 2013–2019. Ketika laju perbaikan melambat sedemikian rupa, kelompok masyarakat yang sebelumnya baru sedikit naik kelas sangat mudah kembali jatuh ke bawah oleh guncangan inflasi, konflik, iklim, atau kehilangan pekerjaan. ([World Bank](#))

3.2 Pekerjaan tersedia, tetapi pekerjaan layak belum cukup

Krisis ketimpangan global tidak dapat dibaca hanya dari distribusi pendapatan; ia juga harus dibaca dari struktur pasar kerja. ILO dalam *World Employment and Social Outlook 2025* melaporkan bahwa tingkat pengangguran global pada 2024 tetap sekitar 5 persen, tetapi *jobs gap*—jumlah orang yang ingin bekerja namun belum memperoleh pekerjaan—

masih sangat besar. Laporan itu merinci bahwa *jobs gap* mencakup sekitar 186 juta penganggur dan 137 juta orang dalam *potential labour force*, terutama pekerja yang putus asa. Ini berarti jutaan orang hidup dalam zona abu-abu: tidak sepenuhnya tercatat sebagai penganggur, tetapi juga tidak benar-benar terintegrasi dalam pekerjaan yang aman dan produktif.

([International Labour Organization](#))

Masalahnya tidak berhenti pada kuantitas pekerjaan, tetapi juga kualitasnya. ILO menekankan bahwa defisit pekerjaan layak masih besar, sementara pertumbuhan produktivitas global melambat dan kesenjangan produktivitas antara negara kaya dan negara miskin tetap lebar. Dalam situasi seperti itu, pasar tenaga kerja sering menghasilkan dualisme: sebagian kecil pekerja masuk ke pekerjaan formal berupah baik, sementara sebagian besar lain berputar di sektor informal, kontrak rapuh, atau kerja platform tanpa perlindungan memadai. Di sinilah eksklusi bekerja secara halus: orang tampak "bekerja," tetapi tidak sungguh-sungguh aman.

([International Labour Organization](#))

3.3 Perlindungan sosial masih jauh dari memadai

Salah satu wajah paling keras dari eksklusi adalah tidak adanya bantalan sosial saat guncangan datang. World Bank dalam *State of Social Protection Report 2025* menyatakan bahwa 2 miliar orang di negara berpendapatan rendah dan menengah masih tidak tercakup atau tidak tercakup secara memadai oleh perlindungan sosial dan sistem tenaga kerja. Bank Dunia juga menegaskan bahwa tiga dari empat orang di negara berpendapatan rendah belum memiliki cakupan perlindungan sosial, dan bahkan di negara berpendapatan menengah bawah lebih dari separuh populasi masih belum terlindungi. ([World Bank](#))

Data ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa ekonomi modern masih menempatkan terlalu banyak risiko pada rumah tangga. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, menjadi tua, atau terdampak bencana, terlalu banyak keluarga harus menanggung sendiri konsekuensi

ekonomi yang berat. World Bank menekankan bahwa program perlindungan sosial dan tenaga kerja membantu rumah tangga mengelola krisis, keluar dari kemiskinan, menavigasi transisi, dan menangkap peluang kerja. Jadi, ketidakcukupan perlindungan sosial bukan sekadar kekurangan administratif; ia adalah bentuk eksklusi struktural. ([World Bank](#))

3.4 Ketimpangan dalam kesejahteraan dan pembangunan manusia

OECD menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan lintas gender, usia, dan pendidikan tetap dalam. Walau beberapa gap menyempit selama satu dekade terakhir, banyak perbaikan terjadi karena kelompok yang sebelumnya lebih beruntung justru memburuk, bukan karena kelompok yang tertinggal melompat jauh ke depan. Temuan ini penting karena mengingatkan bahwa ketimpangan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal waktu luang, rasa aman, kesehatan, partisipasi sosial, dan kualitas lingkungan hidup. ([OECD](#))

WHO menambahkan dimensi lain yang sangat penting: kesehatan dan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh kondisi di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, serta oleh akses mereka pada uang, kekuasaan, dan sumber daya. WHO bahkan menyatakan bahwa ketidakadilan sosial terus “membunuh dalam skala besar” karena akar non-medis dari kesehatan yang buruk belum ditangani. Dengan demikian, eksklusi ekonomi harus dibaca sekaligus sebagai eksklusi kesehatan, eksklusi lingkungan hidup, dan eksklusi peluang jangka panjang. ([World Health Organization](#))

3.5 Kesenjangan digital sebagai bentuk eksklusi baru

Pada abad ke-21, eksklusi tidak hanya terjadi pada tanah, pendidikan, atau kredit, tetapi juga pada konektivitas digital. ITU melaporkan bahwa pada 2024 terdapat 189 juta lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang menggunakan internet secara global; 70 persen laki-laki menggunakan internet, sementara perempuan 65 persen. ITU juga menekankan bahwa

dunia memang bergerak perlahan menuju paritas gender dalam penggunaan internet, tetapi kemajuan tersebut tetap rapuh dan tidak merata, terutama di negara-negara paling miskin. ([ITU](#))

Sementara itu, World Bank melalui *Global Findex 2025* menunjukkan bahwa 79 persen orang dewasa di dunia kini memiliki akun keuangan, naik dari 74 persen pada 2021. Ini adalah kabar baik, tetapi bukan akhir cerita. Findex juga menekankan bahwa akses yang lebih luas terhadap akun digital dan layanan keuangan belum menghapus gap penggunaan, keamanan, dan ketahanan keuangan, khususnya bagi kelompok miskin dan perempuan. Dalam bahasa sederhana, banyak orang sudah “terhubung”, tetapi belum tentu “berdaya.” ([World Bank](#))

4. Mengapa Pertumbuhan Saja Tidak Cukup

IMF menggambarkan ekonomi global berada pada *critical juncture amid policy shifts*. Dalam *World Economic Outlook* April 2025, IMF menekankan bahwa ketidakpastian kebijakan, ketegangan perdagangan, dan perubahan besar dalam lingkungan ekonomi global sedang menguji ketahanan ekonomi dunia. Dalam situasi seperti itu, strategi yang hanya mengandalkan pertumbuhan agregat tanpa perlindungan distribusional menjadi semakin rapuh. Pertumbuhan dapat tetap terjadi, tetapi manfaatnya tertahan di puncak sementara risiko turun ke bawah. ([IMF](#))

World Bank juga menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran bersama harus dicapai “di atas planet yang layak huni.” Laporan *Poverty, Prosperity, and Planet 2024* memperingatkan bahwa hampir satu dari lima orang berisiko mengalami kerugian kesejahteraan akibat cuaca ekstrem yang sulit dipulihkan. Ini berarti pertumbuhan yang tidak tahan iklim justru memperbesar eksklusi, karena guncangan ekologis hampir selalu menghantam kelompok rentan lebih dahulu dan lebih keras. ([Open Knowledge World Bank](#))

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sekarang harus memenuhi setidaknya tiga syarat. Pertama, ia harus menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Kedua, ia harus memperluas kapabilitas dasar melalui pendidikan, kesehatan, dan konektivitas. Ketiga, ia harus tahan terhadap guncangan sosial, iklim, dan teknologi. Tanpa tiga syarat ini, pertumbuhan hanya akan meningkatkan rata-rata tanpa menutup jurang. Kerangka ini sejalan dengan catatan kebijakan World Bank tentang perlunya menguatkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

5. Lima Pilar Jawaban: Menuju Kemakmuran Tanpa Eksklusi

5.1 Pertumbuhan yang kaya pekerjaan

Pilar pertama adalah pertumbuhan yang kaya pekerjaan, bukan pertumbuhan yang hanya menaikkan nilai aset atau output agregat. World Bank menegaskan bahwa jalan keluar dari polycrisis memerlukan pertumbuhan yang lebih cepat sekaligus lebih inklusif, terutama melalui kenaikan pendapatan tenaga kerja. ILO, di sisi lain, menekankan bahwa pasar kerja global masih dibayangi defisit pekerjaan layak dan *jobs gap* yang besar. Maka, kebijakan industri, infrastruktur, hilirisasi, transformasi hijau, dan digitalisasi harus dinilai dari seberapa besar mereka memperluas pekerjaan bermutu, bukan hanya dari jumlah investasi yang masuk. ([Open Knowledge World Bank](#))

World Development Report 2024 memberi petunjuk penting melalui strategi *3i: investment, infusion, dan innovation*. Menurut World Bank, negara berkembang tidak cukup hanya menarik investasi; mereka perlu menyerap teknologi dan praktik baru, lalu bergerak menuju inovasi. Namun proses ini hanya akan inklusif bila tenaga kerja lokal, UMKM, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan ikut masuk ke dalam rantai nilai. Jika

tidak, modernisasi justru menghasilkan ekonomi yang lebih canggih tetapi lebih eksklusif. ([World Bank](#))

5.2 Pemerataan kesempatan sejak awal kehidupan

Pilar kedua adalah pemerataan kesempatan sebelum pasar bekerja. World Bank dalam kebijakan inklusifnya menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini, sekolah yang lebih setara, pendidikan tinggi yang terjangkau, kesehatan universal, *childcare*, dan dukungan keluarga. Arah ini sangat penting karena ketimpangan ekonomi banyak kali bermula jauh sebelum seseorang memasuki pasar kerja. Anak yang lahir di lingkungan dengan gizi buruk, sekolah rendah mutu, dan akses internet lemah sudah memulai hidup dengan garis start yang lebih jauh. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

WHO menguatkan argumen ini melalui konsep determinan sosial kesehatan. Kesehatan dan kualitas hidup, menurut WHO, dibentuk oleh kondisi tempat orang hidup, belajar, bekerja, dan menua. Karena itu, kemakmuran tanpa eksklusi tidak mungkin dibangun hanya lewat bantuan setelah orang miskin jatuh. Ia harus dibangun melalui fondasi yang membuat lebih sedikit orang jatuh sejak awal. Di sinilah pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, air bersih, dan konektivitas publik tampil sebagai investasi produktif, bukan beban fiskal semata. ([World Health Organization](#))

5.3 Perlindungan sosial yang universal dan adaptif

Pilar ketiga adalah perlindungan sosial yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih adaptif. World Bank menegaskan bahwa dunia perlu secara bertahap menutup gap cakupan dan kecukupan perlindungan sosial bagi kelompok termiskin. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa perluasan perlindungan sosial, repurposing subsidi yang regresif, dan penguatan pembiayaan dapat menjadi jalan untuk memperbaiki keamanan ekonomi warga. Bagi rumah tangga miskin, perlindungan sosial bukan semata transfer; ia adalah perlindungan terhadap jatuh bebas. ([World Bank](#))

Pilar ini semakin penting dalam ekonomi yang makin terdigitalisasi dan fleksibel. Pekerja informal, pekerja *gig*, migran, dan usaha mikro tidak boleh terus dibiarkan berada di luar jaminan dasar. Jika sistem kesejahteraan hanya melindungi pekerja formal tradisional, maka ekonomi masa depan justru akan memproduksi eksklusi baru dalam skala lebih besar. Kemakmuran tanpa eksklusi mensyaratkan agar jaring pengaman mengikuti perubahan dunia kerja, bukan tertinggal di belakangnya. ([International Labour Organization](#))

5.4 Inklusi digital dan finansial yang bermakna

Pilar keempat adalah inklusi digital dan finansial yang tidak berhenti pada akses formal. ITU menunjukkan bahwa jurang gender internet masih nyata, dan World Bank menunjukkan bahwa meskipun 79 persen orang dewasa kini memiliki akun, kemampuan memanfaatkan sistem digital secara aman dan produktif belum merata. Artinya, akses perangkat, internet, akun, dan pembayaran digital harus diikuti oleh literasi, perlindungan konsumen, keamanan siber dasar, identitas digital, dan ekosistem penggunaan yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. ([ITU](#))

Bila tidak, digitalisasi hanya akan mengubah bentuk eksklusi. Orang yang punya ponsel tetapi tidak paham risiko penipuan digital tetap rentan. Pelaku usaha kecil yang menerima pembayaran digital tetapi tidak punya akses pembiayaan layak tetap sulit naik kelas. Siswa yang sesekali terkoneksi tetapi tidak memiliki perangkat memadai tetap tertinggal dalam pembelajaran. Karena itu, inklusi digital yang bermakna harus dipahami sebagai perluasan kapabilitas, bukan hanya penyebaran perangkat. ([Open Knowledge World Bank](#))

5.5 Tata kelola global yang lebih adil

Pilar kelima adalah pembaruan tata kelola global. WTO menegaskan bahwa perdagangan dapat bekerja lebih inklusif bila dilengkapi kebijakan domestik yang tepat, sementara IMF mengingatkan bahwa ketegangan

dagang dan ketidakpastian kebijakan sedang menguji ketahanan ekonomi dunia. Di sisi lain, World Bank menekankan bahwa banyak negara berkembang menghadapi jebakan pendapatan menengah, tekanan utang, dan ruang fiskal yang sempit. Maka, menjawab ketimpangan global tidak cukup hanya dengan reformasi domestik; dunia juga membutuhkan aturan perdagangan, pembiayaan pembangunan, teknologi, dan perpajakan internasional yang lebih fair bagi negara berkembang. ([World Bank](#))

Dalam praktiknya, ini berarti pembangunan tidak boleh hanya menuntut negara miskin "berbenah", sementara struktur global tetap berat sebelah. Transfer teknologi, pembiayaan iklim, ruang kebijakan industri, dan reformasi arsitektur pembiayaan internasional menjadi bagian dari agenda kemakmuran tanpa eksklusi. Tanpa perubahan pada level global, terlalu banyak negara akan dipaksa masuk ke pasar dunia dengan modal sosial dan fiskal yang lemah, lalu dinilai gagal ketika tak mampu bersaing secara setara. ([World Bank](#))

6. Implikasi Strategis bagi Negara Berkembang

Bagi negara berkembang, menjawab krisis ketimpangan global berarti menolak dua jebakan sekaligus. Jebakan pertama adalah keyakinan bahwa pasar global dengan sendirinya akan menghasilkan kemakmuran merata. Jebakan kedua adalah keyakinan bahwa proteksi total akan menyelesaikan masalah. WTO telah menegaskan bahwa proteksionisme bukan jawaban otomatis bagi inklusivitas, sementara World Bank menunjukkan bahwa keterbukaan tanpa kapabilitas domestik juga tidak cukup. Jalan yang lebih masuk akal adalah keterbukaan yang disertai pembangunan kapasitas nasional: pendidikan, kesehatan, logistik, inovasi, perlindungan sosial, dan kebijakan industri yang cerdas. ([World Bank](#))

Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh semata diukur dari angka investasi, volume ekspor, atau pertumbuhan PDB. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah lebih banyak warga memperoleh pekerjaan layak, apakah sekolah dan layanan kesehatan membaik, apakah rumah tangga lebih tahan terhadap guncangan, apakah perempuan dan kaum muda naik kelas, dan apakah wilayah tertinggal mulai terhubung dengan arus produktivitas nasional. Pendekatan OECD tentang kesejahteraan multidimensi dan kerangka World Bank tentang pertumbuhan inklusif memberi landasan yang kuat untuk pergeseran indikator semacam ini. ([OECD](#))

7. Penutup

Krisis ketimpangan global pada akhirnya adalah krisis tentang siapa yang diikutsertakan dalam masa depan. Dunia telah membuktikan bahwa pasar, perdagangan, dan teknologi dapat menghasilkan kemajuan besar. Namun dunia juga kini menunjukkan batas-batas model pembangunan yang terlalu percaya bahwa pertumbuhan rata-rata dengan sendirinya akan mengatasi ketidakadilan. Data terbaru memperlihatkan pengurangan kemiskinan yang melambat, kesenjangan kesejahteraan yang tetap besar, pekerjaan layak yang belum cukup, perlindungan sosial yang timpang, dan jurang digital yang masih nyata. Semua ini menunjukkan bahwa kemakmuran yang dihasilkan dunia modern belum bebas dari eksklusi. ([World Bank](#))

Karena itu, “kemakmuran tanpa eksklusi” harus dipahami sebagai proyek institusional yang menghubungkan pertumbuhan dengan keadilan. Pertumbuhan perlu diperkaya oleh pekerjaan; pekerjaan perlu diamankan oleh perlindungan sosial; perlindungan sosial perlu ditopang oleh fiskal yang lebih adil; dan semua itu perlu diperluas oleh pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta tata kelola global yang lebih seimbang. Kemakmuran

yang sah bukanlah kemakmuran yang hanya meningkatkan rata-rata, melainkan kemakmuran yang memperkecil pengucilan dan memperbesar kemungkinan hidup layak bagi sebanyak mungkin manusia. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Glosarium

Eksklusi sosial-ekonomi

Proses ketika individu atau kelompok tersisih dari akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, teknologi, atau partisipasi ekonomi secara penuh. ([World Health Organization](#))

Kemakmuran inklusif

Keadaan ketika pertumbuhan ekonomi disertai perluasan kesempatan, distribusi manfaat yang lebih merata, dan penurunan kerentanan bagi kelompok bawah. ([Serviços e Informações do Brasil](#))

Shared prosperity

Konsep World Bank untuk menilai apakah kemajuan ekonomi turut meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan lebih rendah. ([World Bank](#))

Jobs gap

Jumlah orang yang ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan, termasuk penganggur dan mereka yang putus asa atau sementara tidak tersedia untuk bekerja. ([International Labour Organization](#))

Perlindungan sosial

Serangkaian kebijakan publik yang membantu rumah tangga dan pekerja

mengelola risiko, keluar dari kemiskinan, menavigasi transisi, dan menangkap peluang kerja. ([World Bank](#))

Determinasi sosial kesehatan

Kondisi tempat orang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, serta akses terhadap uang, kekuasaan, dan sumber daya yang memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. ([World Health Organization](#))

Inklusi digital

Perluasan akses yang adil terhadap internet, perangkat, keterampilan digital, dan keamanan penggunaan teknologi. ([ITU](#))

Inklusi finansial

Akses dan penggunaan layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan relevan bagi kehidupan ekonomi masyarakat. ([World Bank](#))

Ketimpangan global

Perbedaan besar dalam pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau kualitas hidup antarnegara dan di dalam negara. ([WID - World Inequality Database](#))

Middle-income trap

Kondisi ketika negara berpendapatan menengah kesulitan naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas, inovasi, dan transformasi struktural terhambat. ([World Bank](#))

Referensi (APA 7)

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ILO.

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook: A critical juncture amid policy shifts*. IMF.

International Telecommunication Union. (2024). *Facts and figures 2024*. ITU.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *How's life? 2024: Measuring well-being*. OECD Publishing.

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI*. UNDP.

World Bank. (2024). *Policies for inclusive growth: Strengthening the link between economic growth and equity*. World Bank.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank.

World Bank. (2024). *World development report 2024: The middle-income trap*. World Bank.

World Bank. (2025). *State of social protection report 2025: The 2-billion-person challenge*. World Bank.

World Bank. (2025). *The Global Findex database 2025*. World Bank.

World Health Organization. (2025). *Social determinants of health*. WHO.

World Inequality Database. (2024). *10 facts on global inequality in 2024*. WID.world.

World Trade Organization. (2024). *World trade report 2024: Trade and inclusiveness—How to make trade work for all*. WTO.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 13 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69db94ae-3dec-8398-916d-3a7fb8f50b29>